

BAB II

TINJAUAN TEORI

II.1. Kajian Pustaka

Fenomena keluarga politik bukanlah hal yang baru dan hampir terjadi diseluruh negara, namun kajian tentang keluarga politik belum terlalu banyak. Berdasarkan penelusuran literatur, berikut uraian hasil dari penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang keluarga politik dari berbagai perspektif:

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan Haryanto (2014), dengan judul penelitian klanisasi demokrasi, politik klan Qahar Mudzakkar di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klan Qahar Mudzakkar hadir dari reproduksi modal sosial dan modal simbolik. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal yang mendasar dari keberhasilan klan Qahar Mudzakkar dalam politik lokal di Sulawesi Selatan. Pertama, warisan simbolik Qahar Mudzakkar yang berupa mitos, karisma, romantisme dan syariat Islam yang kemudian terkonversi menjadi modal simbolik yang melekat pada keturunannya. Kedua, warisan Qahar Mudzakkar berupa jaringan yang terlembaga maupun yang tidak terlembaga yang identik dengan DI/TII, Muhammadiyah, dan ke-Luwu-an, yang terkonversi menjadi modal sosial.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Djati (2013) dengan judul revivalisme kekuatan familisme dalam demokrasi: dinasti politik di aras lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat kerabatnya sebagai upaya untuk menutupi aib kekuasaannya. Familisme dalam penelitian ini dipengaruhi dari

berbagai sumber politik seperti, populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membentuk tipologi karakter politik dinasti di Indonesia.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Bakti (2014) dengan judul penelitian kekuasaan keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah memperkuat pemerintahan otokratis, bukan menciptakan tata pemerintahan yang baik, transparan dan demokratis.

Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Purwaningsih (2015) dengan judul politik kekerabatan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan pada era reformasi (studi tentang rekrutmen politik pada partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan tahun 2009). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berkembangnya politik kekerabatan di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasar diantaranya adalah lemahnya institusionalisasi partai politik, oligarki partai dalam rekrutmen politik, legasi politik yang dimiliki oleh keluarga politik, dan kesempatan politik yang diberikan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dengan sistem multipartai dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak. Selain temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua politisi yang berasal dari keluarga politik merupakan manifestasi dari politik kekerabatan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Bakar (2013) dengan judul penelitian politik dinasti dan pelembagaan partai politik, pengalaman DPC PDIP dan keluarga Banteng di Kepulauan Selayar. Penelitian ini menunjukkan bahwa PDIP

Kepulauan Selayar seolah menjadi organisasi keluarga hingga dalam proses kandidasi dipengaruhi oleh faktor ketokohan. Di sisi lain, pengurus pusat memutuskan persoalan di tingkat lokal dengan asas persangkaan kondisi dialektik di daerah.

Suaib dan La Husen Zuada (2015) meneliti tentang fenomena “bosisme lokal” di era desentralisasi: studi hegemoni politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi dan desentralisasi menciptakan bosisme lokal yang kuat secara ekonomi dan berkuasa secara politik. Bos lokal juga memanfaatkan kelonggaran pengaturan desentralisasi dengan mempersiapkan keluarganya sebagai pewaris tahta kekuasaan selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Smith (2012) tentang *succeeding in politics: dynaties in democracies*, dengan kesimpulan bahwa “warisan” para kandidat menikmati keuntungan jabatan yang didapatkan dalam karirnya, baik melalui proses seleksi maupun dalam pemilihan umum. Tapi nilai relatif dari manfaat jabatan yang diwariskan berubah-ubah secara signifikan dalam konteks kelembagaan dan proses rekrutmen kandidat dalam partai.

Penelitian yang dilakukan oleh Asako (2015) dengan judul penelitian *dynastic politicians: theory and evidence from Japan*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan legislator non-dinasti, legislator dinasti lebih mudah menguasai daerah untuk memenangkan pemilu, meskipun jumlah yang lebih besar dari manfaat distributif yang mereka bawa, akan tetapi legislator dinasti membahayakan roda perekonomian daerah.

Terkahir, penelitian yang dilakukan Querubin (2013) yang meneliti tentang *political reform and elite presistence: term limits and political dyanasties in the Philippines*. Penelitian ini menyimpulkan reformasi politik di Filipina tidak berdampak secara signifikan dari batas waktu yang ditetapkan untuk mengekang presistensi keluarga petahana dalam berkuasa. Hal itu disebabkan karena kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh petahana.

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil
Haryanto (2014)	Klanisasi Demokrasi, Politik Klan Qahar Mudzakkar di Sulawesi Selatan	Klan Qahar Mudzakkar hadir dari reproduksi modal sosial dan modal simbolik. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal yang mendasar dari keberhasilan klan Qahar Mudzakkar dalam politik lokal di Sulawesi Selatan. Pertama, warisan simbolik Qahar Mudzakkar yang berupa mitos, karisma, romantisme dan syariat islam yang kemudian terkonversi menjadi modal simbolik yang melekat pada keturunannya. Kedua, warisan Qahar Mudzakkar berupa jaringan yang terlembaga maupun yang tidak terlembaga yang identik dengan DI/TII, Muhammadiyah, dan ke-Luwu-an, yang terkonversi menjadi modal sosial.
Wasisto Raharjo Djati (2013)	Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal	Gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat kerabatnya sebagai upaya untuk menutupi aib kekuasaannya. Familisme dalam penelitian ini dijelaskan dipengaruhi dari berbagai sumber politik seperti, populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membentuk tipologi karakter politik dinasti di

		Indonesia.
Andi Faisal Bakti (2014)	Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan	Desentralisasi dan otonomi daerah telah memperkuat pemerintahan otokratis, bukan menciptakan tata pemerintahan yang baik, transparan dan demokratis.
Titin Purwaningsih (2015b)	Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan	Pewarisan ketertarikan pada politik didapatkan melalui diskusi politik dalam keluarga, aktivitas di partai politik dan organisasi sosial yang menjadi modal sebagai politisi. Pewarisan jaringan dan nama besar keluarga juga mempengaruhi dukungan publik kepada kandidat. Pilkada langsung dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak memberikan kesempatan yang lebih besar kepada keluarga politik untuk memperoleh kekuasaannya sehingga jumlah anggota keluarga yang menduduki jabatan politik semakin meningkat. Indeks kualitas kandidat dari keluarga politik cenderung menurun yang dipengaruhi oleh semakin muda usia kandidat untuk memperoleh kekuasaan
Eka Suaib dan La Husen Zuada (2015)	Fenomena “Bosisme Lokal” di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam di Sulawesi Tenggara	Reformasi dan desentralisasi menciptakan bosisme lokal yang kuat secara ekonomi dan berkuasa secara politik. Bos lokal juga memanfaatkan kelonggaran pengaturan desentralisasi dengan mempersiapkan keluarganya sebagai pewaris tahta kekuasaan selanjutnya
Abu Bakar (2013)	Politik Dinasti dan Pelembagaan Partai Politik Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar	PDIP Kepulauan Selayar seolah menjadi organisasi keluarga hingga dalam proses kandidasi dipengaruhi oleh faktor ketokohan. Di sisi lain, pengurus pusat memutuskan persoalan di tingkat lokal dengan asas persangkaan kondisi dialektik di daerah
Daniel Markham Smith (2012)	<i>Succeeding In Politics: Dynaties In Democracies</i>	Penelitian ini mengungkapkan bahwa “warisan” para kandidat menikmati keuntungan jabatan yang didapatkan dalam karirnya, baik

		melalui proses seleksi maupun dalam pemilihan umum. Tapi nilai relatif dari manfaat jabatan yang diwariskan berubah-ubah secara signifikan dalam konteks kelembagaan dan proses rekrutmen kandidat dalam partai.
Asako dkk (2015)	<i>Dynastic politicians: theory and evidence from Japan</i>	Dibandingkan dengan legislator non-dinasti, legislator dinasti lebih mudah menguasai daerah untuk memenangkan pemilu, meskipun jumlah yang lebih besar dari manfaat distributif yang mereka bawa akan tetapi legislator dinasti membahayakan roda perekonomian daerah.
Pablo Querubin (2013)	<i>Political reform and elite persistence: term limits and political dynasties in the Philippines</i>	Reformasi politik di Filipina tidak berdampak secara signifikan dari batas waktu yang ditetapkan untuk mengekang presistensi keluarga petahana dalam berkuasa. Hal itu disebabkan karena kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh petahana.

Dari beberapa penelitian di atas, hampir semua berkesimpulan bahwa kandidat dari keluarga politik mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilihan umum atau menempati jabatan politik. Dalam konteks Indonesia, hal ini akibatkan oleh reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah yang menciptakan elit lokal atau *local bossism* sebagaimana yang diteliti Bakti (2014), Bakar (2013), Suaib (2013). Djati (2013) meneliti tentang faktor terbentuknya familisme politik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Smith (2012) dan Querubin (2013) lebih menyoroti perihal terbentuknya dinasti politik karena sistem pemilihan umum. Dan hampir semua penelitian menyimpulkan bahwa keluarga politik lebih punya banyak potensi untuk terpilih sebagaimana misalnya yang diuraikan oleh Asako (2015).

Penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Purwaningsih (2015b), yang lebih memfokuskan penelitiannya pada aspek kualitas politisi dari keluarga politik. Penelitian yang dilakukan Haryanto (2014) hampir menyerupai penelitian ini namun hanya memfokuskan penelitiannya pada aspek modal sosial dan modal simbolik. Sehingga yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada aspek modalitas, baik modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal politik yang dimiliki oleh keluarga politik. Dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan diatas, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena meneliti variabel lain dari keluarga politik yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

II.2. Kerangka Teori

II.2.1. Teori Modalitas

Modalitas dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dibutuhkan kandidat sebagai upaya untuk memperoleh kemenangan. Sebagaimana yang diuraikan Bourdieu (1986) bahwa modal merupakan akumulasi kerja baik berupa material ataupun simbolik yang jika dialokasikan secara privat oleh agen atau kelompok agen, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh kekuatan sosial. Modal dimaksudkan disini sebagai hubungan sosial, karena modal merupakan energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil dalam kontestasi dimana modal memproduksi dan mereproduksi. Dalam mempertahankan asumsi tentang modal sebagai akumulasi kerja, Bourdieu menjelaskan bahwa koneksi memerlukan kerja.

Solidaritas dalam jaringan hanya mungkin terjadi karena keanggotaan di dalamnya meningkatkan laba, baik laba material maupun laba simbolik.

Untuk mempertahankan hal tersebut, menurut Field (2016:27) dibutuhkan strategi investasi baik secara individual maupun kolektif yang bertujuan mentransformasikan hubungan yang terus berlangsung, baik itu hubungan di kampung, tempat kerja, dan kekerabatan yang dapat dikonversi menjadi hubungan sosial yang secara langsung dapat digunakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga secara garis besar menurut Bourdieu dalam (Haryanto, 2014:19), modal merupakan setiap sumber daya yang efektif di ruang sosial tertentu yang memungkinkan seseorang untuk memastikan adanya keuntungan khusus yang timbul dari partisipasi dan kontestasi di dalamnya. Semakin besar volume modal yang dimiliki seseorang menurut Fashri (2014:29), semakin besar pula kekuasaan yang diwujudkankannya.

Pada dasarnya modal dibedakan kedalam empat kategori, diantaranya adalah modal ekonomi (berupa kekayaan, uang, properti), modal kultural (berupa pengetahuan, kualifikasi pendidikan, gelar akademik, dan bahasa), modal sosial (berbagai jenis relasi dan jaringan) dan modal simbolik (seperti prestise, kehormatan dan kharisma) (Bourdieu, 1989 dan Jenkins, 2016:125). Salah satu modal yang paling penting adalah adanya potensi untuk mengkonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dengannya modal-modal inilah yang kemudian memiliki kekuatan-kekuatan sosial yang fundamental (Haryanto, 2015:15). Kemudian ditambahkan lagi oleh Casey (2008) yaitu modal Politik yang tidak sempat dielaborasi oleh Bourdieu. Berikut ini akan dijelaskan secara terperinci:

1. Modal Ekonomi

Menurut Bourdieu (1986) Modal ekonomi adalah modal yang dimiliki yang paling mudah untuk dikonversi menjadi uang dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak milik. Bagi Bourdieu (1986) modal ekonomi adalah akar dari semua jenis modal lain. Dengan modal ekonomi yang dimiliki, seperti pemilikan perusahaan maka seringkali dipandang sebagai faktor yang menentukan dalam mendorong inovasi dan meningkatkan keunggulan dalam berkompetisi. (Field, 2016:81).

Modal ekonomi akan berjalan secara efektif menurut Putnam dalam (Field, 2016:81) jika pemilik modal ekonomi semakin memperbanyak relasi. Hal ini dipertegas Baum (2000) bahwa orang yang mempunyai modal ekonomi yang lebih banyak akan berdampak pula dengan jaringan sosial yang juga banyak pula.

2. Modal Sosial

Beberapa ahli memberikan deskripsi untuk memahami modal sosial, berikut ini penjelasannya:

Bourdieu (1986) mendefinisikan bahwa modal sosial merupakan jumlah sumber daya baik aktual maupun maya yang berkumpul pada individu atau kelompok karena memiliki jaringan sosial tahan lama melalui hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terlembagakan. Dengan membangun hubungan dengan sesama dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu menurut

Field (2016:1), orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat dilakukan dengan sendirian.

Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, maka hal itu dapat dipandang sebagai modal. Secara umum bahwa semakin banyak mengenal orang, semakin banyak memiliki kesamaan cara pandang, maka akan semakin kaya modal sosial yang dimiliki (Field 2016:1). Dipertegas oleh Field (2016:1) bahwa inti dari modal sosial adalah soal hubungan.

Modal sosial menurut Coleman (1988) adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Modal sosial akan bekerja menurut Coleman (1988) jika antar aktor individu menjalin kerjasama, menciptakan kewajiban dan harapan, membangun kejujuran lingkungan sosial, membuka saluran informasi dan menetapkan norma-norma yang membentuk perilaku serta menerapkan sanksi bagi para penunggang bebas (*free rider*).

Coleman (1988) berasumsi bahwa pada dasarnya modal sosial memiliki dua unsur. Pertama, modal sosial mencakup banyak aspek dari struktur sosial. Kedua, modal sosial memberikan banyak kemudahan bagi orang untuk melakukan banyak hal dalam kerangka struktur sosial tersebut.

Modal sosial menurut Fukuyama (2010:13) adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya hubungan kerjasama yang didasari oleh kepercayaan yang memiliki nilai ekonomis yang sangat besar dan penting. Kunci dari modal sosial menurut Fukuyama adalah *trust* (kepercayaan).

Menurut Putnam (2001) modal sosial adalah jaringan, norma yang dapat dengan mudah dikembangkan secara timbal balik yang berkoordinasi untuk kepentingan bersama. Ditambahkan Putnam dalam (Field, 2016:51) gagasan inti dari modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai, kontak sosial memengaruhi produktivitas individu dan kelompok.

Dari berbagai pengertian di atas, Woolcock (2001) menyederhanakan dengan membagi modal sosial ke dalam tiga bentuk. Pertama, modal sosial yang mengikat, merupakan ikatan antar orang dalam situasi yang sama, yang mencakup hubungan kekerabatan dan teman akrab. Kedua, modal sosial yang menjembatani, diantaranya adalah teman jauh dan teman kerja. Ketiga, modal sosial yang menghubungkan, yang mencakup orang-orang yang berada pada situasi yang berbeda, misalnya anggota komunitas yang memanfaatkan sumber daya diluar komunitas daripada memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam komunitas.

3. Modal Kultural

Modal kultural menurut Bourdieu (1986) dibagi dalam tiga bentuk. Pertama, dalam keadaan non-fisik yaitu dalam bentuk disposisi tahan lama dari pikiran dan tubuh seperti cara berbahasa, cara berjalan dan perilaku yang lainnya. Kedua, dalam bentuk materi, seperti dalam bentuk barang budaya (lukisan, buku, alat elektronik, mesin) dan masih banyak lagi yang menunjukkan status sosial. Ketiga, keadaan terlembagakan, seperti kualifikasi akademik, gelar yang menggambarkan kualitas intelektual.

Pada dasarnya interpretasi dominan tentang modal kultural menurut Lareau (2003) telah disatukan dari dua tempat yang berbeda. Pertama, modal kultural menunjukkan pengetahuan atau fasilitas dengan estetika budaya. Kedua, modal kultural adalah analitis dan kausal dari pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan prestasi.

Modal kultural merupakan mekanisme reproduksi struktur hubungan kekuasaan dan hubungan simbolis yang menciptakan stratifikasi sosial yang merupakan hasil dari reproduksi kultural melalui sistem pendidikan (Bourdieu, 1999). Hal ini dipertegas oleh Haryanto (2014:67) bahwa sistem pendidikan adalah instrumen dari reproduksi kultural dalam masyarakat mulai sejak lahir, masa sekolah hingga kegiatan-kegiatan kebudayaan yang berhubungan dengan pengetahuan dan budaya literasi, baik institusi formal maupun tradisional. Ketika reproduksi pengetahuan tersebut terus-menerus

dilakukan, maka dibalik semua itu terdapat sebuah usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh kelas dominan terhadap yang terdominasi, demikian juga sebaliknya, dimana kelas terdominasi berusaha untuk mendapatkan akses terhadap posisi-posisi dominan. Sehingga menurut Jenkins (2016:171) proses reproduksi budaya mereproduksi relasi kelas dalam struktur sosial.

4. Modal Politik

Modal politik menurut Casey (2008) adalah pengakumulasian dari kombinasi jenis modal lain yang menurut Boudieu dibagi atas empat yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal simbolik untuk tindakan politik atau pengembalian untuk investasi modal politik. konseptualisasi modal yang telah dikembangkan Bourdieu tersebut dapat diaktualisasikan dan diperluas ke dalam bentuk kekuasaan. Ditambahkan oleh Casey (2008) bahwa sumber daya modal lainnya sangat diperlukan untuk produksi modal politik. sumber daya modal lainnya digabung dan diterapkan untuk pasar tertentu yang diidentifikasi sebagai bentuk baru khas modal. Dengan kata lain, modal ekonomi dimobilisasi untuk tujuan politik, bukan lagi modal ekonomi dalam arti dapat diterapkan langsung dalam usaha ekonomi, tetapi digunakan untuk mendapatkan hasil politik, apakah itu untuk mendanai proyek, partai, kandidat dan lain-lain.

Modal politik kemudian diaktualisasikan kedalam tiga bentuk pasar politik menurut Casey (2008), yaitu pemilihan umum untuk

memilih pemimpin dalam sistem demokratis, perumusan dan implementasi kebijakan, dan dominasi kelembagaan. Menurut Zaldi (2012) pembentukan modal politik menyerupai pembentukan modal jenis lainnya, dengan cara aktor secara aktif mengejar hasil politik. Kemudian dipertegas oleh Marijan (2015:184) bahwa modal politik adalah adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat atau elit. Elit yang dimaksud disini adalah elit politik yang menurut Lasswell dalam Bottomore (2006:10) adalah elit yang terdiri dari para pemegang kekuasaan suatu lembaga politik yang kepadanya diberikan pertanggungjawaban selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Modalitas dibutuhkan setiap kandidat dalam kontestasi politik. Dalam penelitian ini, modalitas yang digunakan terdiri dari empat modal menurut Bourdieu (1989) kecuali modal simbolik, karena tidak sesuai dengan kepentingan penelitian, sedangkan modal lainnya seperti modal ekonomi, modal sosial dan modal kultural inilah yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian ditambahkan satu lagi modalitas yaitu modal politik sebagaimana yang diuraikan Casey (2008).

II.2.2. Konsep Keluarga Politik

Hingga kini belum ada definisi seragam untuk menggambarkan keluarga politik, istilah yang paling umum digunakan adalah politik dinasti sebagaimana yang diuraikan oleh Dal Bo (2009) bahwa politik dinasti merupakan keikutsertaan politisi yang mempunyai hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya. Hal

yang sama juga diuraikan oleh Asako (2015) bahwa politik dinasti terjadi apabila satu anggota keluarga menduduki jabatan politik yang anggota keluarga sebelumnya telah menduduki jabatan tersebut.

Querubin (2012) juga menggunakan istilah politik dinasti untuk menggambarkan upaya khusus elit untuk mempertahankan dan menciptakan kembali kekuasaan mereka dari waktu ke waktu dimana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik. Demikian juga Djati (2013) mendefinisikan dinasti politik sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan kepada orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Setya (2016:93) menggunakan istilah politik dinasti yang merujuk kepada suatu proses berpolitik dimana untuk memperoleh, mempertahankan, dan melanggengkan kekuasaan yang dilakukan berdasarkan regenerasi melalui garis keturunan atau hubungan kekerabatan.

Purwaningsih (2015) menggunakan istilah politik kekerabatan dengan merujuk kepada proses rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga dengan menduduki jabatan politik atau pemerintahan yang tidak berdasarkan kemampuan ataupun prosedural yang telah ditetapkan. Namun lebih berdasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatan baik karena keturunan ataupun perkawinan. Purwaningsih (2015) menggunakan istilah politik kekerabatan untuk menghindari istilah politik dinasti dalam sistem monarki, namun dalam sistem demokrasi yang dihasilkan melalui mekanisme pemilihan umum. Sedangkan Casey dalam (Purwaningsih, 2015) menggunakan istilah keluarga politik untuk menggambarkan keikutsertaan keluarga dalam jabatan politik. Casey

mendefinisikan keluarga politik terjadi karena adanya perkawinan atau hubungan darah dalam dua generasi kandidat pejabat politik.

Dari beberapa istilah dan pengertian yang telah diuraikan diatas, Purwaningsih (2015) menyederhanakan keluarga politik dengan membagi beberapa dimensi, diantaranya dimensi waktu (keluarga dari pejabat politik sebelumnya, minimal dua periode), dimensi jumlah (dua orang atau lebih serta dua generasi) dimensi jabatan politik (jabatan politik yang sama atau jabatan politik yang berbeda) dan yang terakhir adalah dimensi kekuasaan (mempertahankan atau memperluas kekuasaan).

Keluarga politik begitu marak terjadi, bukan hanya di Indonesia melainkan hampir terjadi diseluruh dunia tidak terkecuali negara yang dicap sebagai negara yang paling demokratis, Amerika Serikat (Bakar, 2016). Djati (2013) melihat proses terbentuknya keluarga politik dengan menggunakan sudut pandang budaya politik, dengan membaginya ke dalam tiga pendekatan yaitu neopatriomonalisme, klan politik, dan predator politik. Menurut pendekatan neopatriomonalisme keluarga politik terbentuk karena adanya ekse negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak oleh sirkulasi hubungan inti genealogis berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan yang sama untuk pelanggaran kekuasaan keluarga. Hal tersebut yang menjadi pemicu kerabat menjadi elit sebagai kata kunci pemahaman tentang keluarga politik.

Keluarga politik terjadi menurut pendekatan klan politik bahwa keluarga politik terbentuk karena ekse dari warisan feodalisme yang masih sangat kuat

dalam masyarakat. Bukan hanya sekadar penguasaan sumber daya ekonomi untuk menggambarkan feodalisme dalam hal ini, tetapi adanya loyalitas dari masyarakat terhadap tokoh informal. Pada umumnya tokoh informal memiliki banyak massa yang dapat menunjang kekuasaan keluarga. Sedangkan yang terakhir adalah pendekatan politik predator yaitu keluarga politik terjadi karena adanya kolusi bisnis-politik. Jejaring keluarga yang telah menguasai pembangunan daerah yang dibagikan kepada kroni-kroninya. Untuk melanggengkan kolusi tersebut bukan hanya menempatkan sanak keluarga di perusahaan tetapi juga di pemerintahan. (Djati, 2013).

Purwaningsih (2015) juga menganalisis faktor yang melatarbelakangi terbentuknya keluarga politik dengan pendekatan politik. Menurutnya, faktor terbentuknya keluarga politik diantaranya adalah oligarki politik dalam rekrutmen politik, legasi politik, lemahnya institusionalisasi partai, kesempatan politik yang diberikan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, sistem multipartai dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak.

Menguatnya keluarga politik merupakan indikasi dari buruknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya dan pada khususnya buruknya kemampuan rekrutmen serta kaderisasi partai politik. Dengan bertumbuhnya keluarga politik, maka *playing field* juga akan semakin tidak stabil karena keluarga politik akan semakin memperluas pengaruh, penguasaan terhadap wilayah dan kontrol terhadap ekonomi, sehingga dalam kontestasi politik potensi untuk memenangkan lebih besar dibandingkan dengan calon lain (Harjanto, 2011).

Praktik keluarga politik begitu marak terjadi disistem demokratis, olehnya itu Djati (2013) menyederhanakannya dengan membagi tiga model kekeluargaan dalam keluarga politik yaitu familisme, quasi-familisme dan ego-familisme. Pertama, familisme yakni keluarga politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga dan hubungan perkawinan dengan klan lainnya.

Bagi keluarga politik yang lebih lemah posisinya akan menguntungkan dengan keluarga politik yang lebih kuat karena akan menjamin eksistensi keluarga politik lemah tersebut. Di sisi lainnya, keluarga politik mendapatkan jejaring yang lebih besar dengan mampu mengikat keluarga lainnya. Loyalitas, kepatuhan, maupun solidaritas keluarga merupakan tiga poin penting familisme memengaruhi corak keluarga politik (Garzon dalam Djati, 2013)..

Model Kedua menurut Djati (2013) adalah quasi-familisme. Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah menurut Park dalam (Djati, 2013) tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun sebagai bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan, maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut Artinya, dimensi keluarga politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem kekerabatan berbasis artifisial. Oleh karena itu, dalam model quasi-familisme, semua anggota famili berusaha mengidentifikasikan diri melalui simbol-simbol tertentu supaya mendapat legitimasi dari keluarga lainnya. Adapun proses

identifikasi bisa melalui penggunaan nama keluarga, jalur perkawinan, maupun ritus keluarga lainnya.

Model Ketiga menurut Djati (2013) adalah egoisme-familisme. Model keluarga politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Menurut Park dalam (Djati, 2013) konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga daripada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan. Kepala daerah yang digantikan masih memiliki pengaruh terhadap penggantinya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa terdapat pemerintahan bayangan yang dilakukan kepala daerah demisioner terhadap penggantinya.

Tabel 2.2

Model Kekeluargaan dalam Keluarga Politik

No	Indikator	Familisme	Quasi-Familisme	Ego-Familisme
1	Dasar Pembentukan keluarga politik	Hubungan darah langsung	Hubungan afeksi, solidaritas dan kepercayaan keluarga besar dan kroninya	Dorongan masyarakat dan pertimbangan politik fungsional
2	Kaderisasi	Keluarga inti dan kroni	Keluarga inti maupun keluarga lain melalui jalur pernikahan yang sekuturunan	Keluarga inti
3	Sifat keluarga politik	Tertutup	Semi tertutup	Tertutup

Sumber: Djati (2013)

Selain model kekeluargaan dalam keluarga politik telah dijelaskan di atas, Purwaningsih (2015) lebih jauh membagi tipologi keluarga politik yang terbentuk karena rekrutmen politik kedalam tiga bentuk. Pertama, keluarga politik oligarki meritokratik, yaitu keluarga politik yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi, bersumber pada kualitas yang dimiliki oleh kandidat, namun *meryt-system* tidak bekerja sepenuhnya karena pada pengambilan keputusan ada kecenderungan ke arah oligarki yang melemahkan aspek impersonal dalam *meryt-system*. Kedua, keluarga politik transaksional, yaitu terbentuknya keluarga politik karena semata-mata adanya transaksi politik/balas jasa antara kedua pihak, sehingga kurang memperhatikan aspek kompetensi kandidat. Ketiga, keluarga politik pragmatis, yaitu keluarga politik yang terbentuk karena direkrut secara elitis, yang berasal dari kader atau non kader yang lebih mementingkan jangka pendek untuk memperoleh suara tanpa mempertimbangkan kualitas kandidat.

Selain tipologi keluarga politik diatas, pembentukan keluarga politik dilakukan dengan dua cara yaitu *by design* dan *by accident*. *By design* adalah jaringan kekeluargaan dalam pemerintahan sudah kuat relasinya, sehingga anggota keluarga yang ingin terjun dalam politik dan pemerintahan sudah didesain sejak lama untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Misalnya, istri yang maju menggantikan suami atau anak yang menggantikan bapaknya. Sedangkan *by accident* adalah suksesi pemerintahan yang tiba-tiba mencalonkan anggota keluarga untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya jika menang dalam pilkada. Misalnya, kerabat sebagai calon kepala daerah hanya sebagai bayangan dari kerabat lainnya yang lebih difavoritkan untuk

menang dalam pilkada. Pola yang dilakukan umumnya bersifat sporadis untuk menjegal calon lain maju dalam proses pengajuan kandidat (Djati, 2013).

Tesis ini menghindari penggunaan istilah politik dinasti yang paling umum digunakan karena memiliki ambiguitas makna. Politik dinasti hanya ada pada sistem monarki, namun pada sistem demokratis dimana pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, praktik kekuasaan turun-temurun masih saja terjadi. Olehnya itu, untuk menghindari ambiguitas makna tersebut, tesis ini menggunakan istilah keluarga politik yang mengacu pada Casey (2008).

II.2.3. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung akhirnya menggantikan pemilihan kepala daerah tidak langsung, yang didasari oleh semangat pemberdayaan dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara lebih demokratis. Karena karakter dan filosofi awal dari pelaksanaan pilkada adalah nilai demokratisasi. (Suyatno, 2016 dan Mawardi, 2011:88)

Sehingga gagal tidaknya pilkada sebagai bagian dari demokratisasi tentunya dapat dilihat dari demokratis tidaknya pelaksanaan pilkada. Demokratisasi pilkada setidaknya mengandung beberapa indikator. Pertama, rakyat memiliki kemadirian dan kapasitas yang rasional dalam menentukan pilihannya. Kedua, proses pilkada berlangsung dengan baik, lancar dan damai sesuai dengan prosedur yang demokratis. Ketiga, pilkada mampu melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan akseptabilitas yang memadai. Keempat, kepemimpinan yang dilahirkan oleh proses pilkada harus mampu membentuk

pemerintahan yang bersih dan kuat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Mawardi 2011:88).

Pilkada dijadikan sebagai momentum untuk mentransformasikan nilai-nilai demokratis agar terjadi pendalaman demokrasi di daerah yang sehat dan bertanggung jawab. Sebagaimana pendapat Dahl dikutip Mawardi (2011:120) dapat dijadikan pijakan awal dalam membaca peta demokrasi dalam konteks pilkada. Dahl melihat sebuah rezim politik dapat dianggap demokratis jika memenuhi tiga kriteria. Pertama, menyelenggarakan pemilihan terbuka dan bebas. Kedua, mengembangkan pola kehidupan politik yang kompetitif. Ketiga, memberi perlindungan terhadap kebebasan masyarakat.

Demokrasi melalui pemilihan kepala daerah secara langsung menurut Yamin dan Agustino (2014) merupakan pintu peralihan era orde baru yang sentralistik ke era desentralisasi politik di tingkat lokal. Demokratisasi akhirnya dijadikan kekuasaan oleh masyarakat lokal untuk membuat keputusan demi kepentingan dan memilih pemimpin daerahnya secara langsung.

Menurut Zaman (2016:xlix) proses penyelenggaraan pilkada akan demokratis atukah tidak bergantung pada undang-undang yang mengatur pilkada tersebut. Hal ini tidak lain karena undang-undang pilkada akan mengatur apa yang menjadi asas penyelenggaraan pilkada, proses penyelenggaraan tahapan pilkada, proses persaingan antar pasangan calon dalam pilkada, apa yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara dan panitia pelaksana pilkada, berbagai bentuk partisipasi penyelenggaraan pilkada dan sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pilkada. Payung hukum tentang pemilihan gubernur, bupati

dan walikota sudah berubah dan dilakukan penyempurnaan beberapa kali diantaranya, UU Nomor 24 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Adapun yang menjadi tujuan dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir dalam Labolo dan Teguh (2015:53) diantaranya adalah pertama, menentukan pemerintahan secara langsung. Kedua, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dengan pemerintah. Ketiga, barometer dukungan rakyat terhadap pemerintah. Keempat, sebagai sarana rekrutmen politik. Kelima, alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Selain itu, menurut Zaman (2016:xliv) pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk menghasilkan kepala daerah yang mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai otonomi daerah.

Menurut Agustino (2009:9) tujuan dari pilkada adalah penguatan demokratisasi di tingkat lokal dapat berwujud, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan legitimasi politik. Asumsinya adalah kepala daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena dukungan dari suara pemilih yang merefleksikan konfigurasi politik dan kepentingan konstituen, sehingga dapat dipastikan kandidat terpilih secara demokratis mendapat dukungan sebagian besar warga. Legitimasi menjadi hal yang sangat penting sebagai modal politik dan diperlukan oleh suatu pemerintahan yang tengah berkuasa.

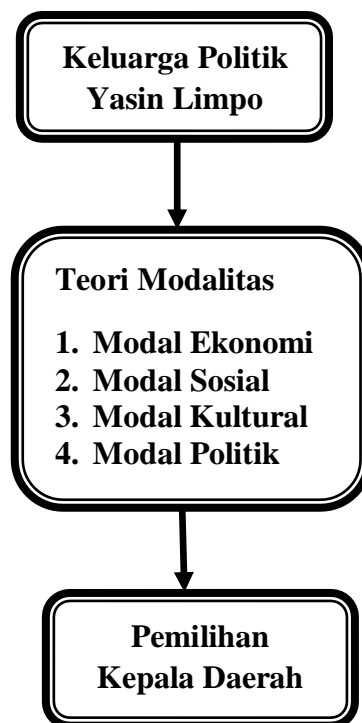
Selain tujuan pilkada yang telah diuraikan di atas, ada nilai-nilai kunci yang erat kaitannya dengan pilkada, dan nilai-nilai itu sering disebut sebagai cita-cita demokrasi dalam pilkada, yaitu partisipasi, bersih dari politik uang, aksesibel,

transparan dan akuntabel. Nilai dasar dari semokrasi itu mengalami perkembangan sepanjang waktu, dan nilai perkembangan tersebut menjadi hal penentu perkembangan pengetahuan masyarakat (Kartika, 2016:3).

II.3. Kerangka Pikir

Bagan II.1

Kerangka Pikir



Alur penelitian ini dilihat dari kerangka pikir di atas dapat dijelaskan secara sederhana bahwa kontestasi keluarga politik Yasin Limpo antara Adnan Purichta Ichsan YL dan Tenri Olle YL yang dilihat dari aspek modalitasnya baik modal ekonomi, modal sosial, modal kultural dan modal politik. Masing-masing keempat modal tersebut dianalisis dan dibandingkan kepemilikannya diantara

kedua kandidat dari keluarga Yasin Limpo pada saat pilkada di Kabupaten Gowa tahun 2015

II.4. Definisi Konseptual

1. Modalitas terbagi atas empat jenis modal, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal politik.
2. Keluarga politik adalah keikutsertaan anggota keluarga dalam politik baik untuk mengisi jabatan politik sebelumnya maupun jabatan politik yang berbeda.
3. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan pemimpin daerah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah.

II.5. Definisi Operasional

Tabel 2.3.

Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Modalitas	1. Modal Ekonomi	1. Harta kekayaan pribadi 2. Dana sumbangan kampanye
	2. Modal Sosial	1. Jaringan relasi/organisasi 2. Warisan basis massa 3. Warisan jaringan birokrasi 4. Kepercayaan masyarakat
	3. Modal Kultural	1. Kualifikasi pendidikan/penghargaan 2. <i>Legacy</i> program 3. Kultur kekerabatan
	4. Modal Politik	1. Pengalaman politik 2. Parpol/gabungan parpol 3. Dukungan tim sukses 4. Survei elektabilitas

Sumber: diolah penulis